



Article Informations
Corresponding Email:
gdwif0502@gmail.com

Received: 02/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PENGARUH KEBIJAKAN *RUSSIA'S PIVOT TO THE EAST* TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL RUSIA-MYANMAR TAHUN 2021-2023

Galuh Dwi Febriani¹⁾, Iing Nurdin²⁾, Tholhah³⁾

^{1 2 3)} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kebijakan *Russia's pivot to the east* mendorong Rusia untuk melakukan ekspansi kerjasama ekonomi ke kawasan Asia Pasifik ditengah tekanan sanksi Barat didukung dengan momentum kudeta politik terjadi di Myanmar pada tahun 2021 dibawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang mendapatkan penolakan dan kecaman internasional membuat kedua negara saling mendekatkan diri dan menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dibandingkan sebelumnya. Melalui penelitian kualitatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak dari kebijakan *Russia's pivot to the east* terhadap hubungan bilateral Rusia dan Myanmar tahun 2021-2023 terhadap sumber daya soft power negara besar, kredibilitas politik, serta keuntungan demokratis yang didapatkan oleh Rusia dan Myanmar dari hubungan bilateral yang terjalin dari periode tahun 2021 hingga 2023 .

Kata kunci : *Pivot*, Rusia, Myanmar, Bilateral, Interdependensi

Abstract

Russia's pivot policy to the east to expand economic cooperation to the Asia Pacific region amidst pressure from Western sanctions and the momentum of the political coup that occurred in Myanmar in 2021 under the leadership of General Min Aung Hlaing which received international approval and condemnation made the two countries come closer and having a relationship. Bilateral relations have become closer than before. Through qualitative research and analytical descriptive methods, this research aims to analyze and describe the impact of Russia's eastern axis policy on bilateral relations between Russia and Myanmar in 2021-

2023 on the soft power resources of large countries, political credibility, and the benefits of democracy obtained. by Russia and Myanmar from bilateral relations established from 2021 to 2023.

Keywords: *Pivot, Russia, Myanmar, Bilateral, Interdependence*

PENDAHULUAN

Kebijakan politik luar negeri Rusia untuk beralih ke Timur (*Russia's Pivot to the East*) atau dalam bahasa Rusia "*Povorot na Vostok*" merupakan pandangan politik luar negeri yang muncul sejak era Uni Soviet. Menurut Alexander Lukin dalam *Russia's Pivot to Asia : Myth or Reality?*" (Lukin, 2016), *Russia's pivot to the east* merupakan strategi kebijakan luar negeri Rusia yang mulai beralih ke Timur (Kawasan Asia Pasifik) yang bertumbuh menjadi pusat perekonomian dunia berdasarkan pada kepentingan nasional Rusia untuk menjalin kerjasama di bidang politik dan ekonomi dengan negara-negara di kawasan timur. Dilambangkan dengan elang berkepala dua, *pivot to the east* memiliki makna bahwa Rusia memandang kearah timur dan barat secara bersamaan, dimana Rusia memandang bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki posisi yang sama strategisnya dengan negara Barat, khususnya di bidang perekonomian.

Pada tahun 1986, Mikhail Gorbachev berpidato di Vladivostok terkait ketertarikannya untuk menjalin hubungan yang baik dan damai serta melangsungkan kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk dengan wilayah Asia(Gorbachev, 1986). Gorbachev tertarik akan keunikan Asia yang dianggap memiliki keunikan yang sama dengan Eropa serta situasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang mulai berkembang membuat Uni Soviet berusaha memulai pembangunannya kearah Timur(Lukin, 2018). Namun gejolak politik dan perekonomian di era kepemimpinan Gorbachev yang disusul dengan bubarnya Uni

Soviet membuat hubungannya dengan Asia tidak berjalan secara efektif.

Pandangan untuk beralih ke Timur kembali muncul di era kepemimpinan Vladimir Putin pada tahun 2012 dimana Rusia menjadi tuan rumah KTT APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Dalam pidato pembuka, Putin menyatakan bahwa kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia (Putin, 2012a). Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 kebijakan luar negeri Rusia atau “*Concept of Foreign Policy of the Russian Federation*” (Putin, 2013) yang menyatakan bahwa adanya gejolak ekonomi dan politik negara-negara Barat yang membuat potensi pembangunan Rusia untuk bergeser ke Timur, terutama wilayah Asia Pasifik yang memunculkan aktor-aktor ekonomi dan politik global baru yang secara signifikan bertumbuh pesat.

Kebijakan *pivot to the east* berorientasi terhadap tiga poin utama, yakni : peningkatan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan Timur Jauh Rusia, peningkatan hubungan politik dengan negara-negara bekas Republik Uni Soviet, serta meningkatkan integrasi ke kawasan Asia Pasifik (Fortescue, 2015). Prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia untuk beralih ke kawasan Asia Pasifik tidak hanya didorong pertumbuhan perekonomian yang dinamis di kawasan Asia—terutama Tiongkok—tetapi juga tekanan yang diberikan oleh negara Barat berupa sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Krimea tahun 2014 membuat Rusia berupaya mendiversifikasi pembangunan ekonomi dan politiknya ke kawasan Asia-Pasifik.

Dalam upaya menyasiasi krisis kepercayaan negara-negara Asia Tenggara, Rusia memanfaatkan momen peralihan

kepemimpinan Junta Militer Myanmar pada 1 Februari 2021 sebagai peluang untuk mempertahankan kepentingannya di Myanmar serta di Asia Tenggara secara keseluruhan. Bersama dengan Tiongkok, Rusia mendukung kudeta politik yang dilakukan Tatmadaw dan menganggapnya sebagai “urusan dalam negeri” Myanmar dan tidak seharusnya diintervensi (Hunt, 2021).

Berbeda dengan Tiongkok yang menahan diri untuk mendukung angkatan bersenjata Myanmar dalam melawan pemberontakan sipil untuk menekan sentimen anti-Tiongkok yang mulai merebak dengan adanya boikot dan penyerangan terhadap pabrik-pabrik milik Tiongkok di Myanmar, Rusia secara terang-terangan menunjukkan minatnya untuk menjadi “sekutu andal dan mitra strategis Myanmar” dengan mengirim Menteri Pertahanan Kolonel Jenderal Alexander Fomin dalam peringatan hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw pada 27 Maret 2021 (Storey, 2021). Rusia berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Myanmar dengan beberapa alasan. Pertama, peningkatan hubungan bilateral dengan Myanmar dapat mendorong peningkatan penjualan persenjataan Rusia ke Myanmar dan menggeser Tiongkok yang selama ini menjadi pasokan utama senjata ke Myanmar. ‘

Kedua, dengan berkuasanya Junta Militer Myanmar dibawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, hubungan militer ke militer dapat terjalin lebih erat yang mendorong aktivitas diplomasi di sektor pertahanan, termasuk latihan bersama dan dibukanya pelabuhan angkatan laut kedua negara. Ketiga, selain di sektor militer, Rusia juga ingin berpartisipasi dalam proyek pengembangan minyak dan gas lepas pantai serta penjualan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terakhir, Rusia ingin meningkatkan dan memperluas kerjasama perdagangan kedua

negara dengan perekrutan Myanmar untuk bergabung dengan Uni Ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Union/ EAEU*) agar terciptanya perdagangan bebas antara kedua negara. Invasi Rusia atas Ukraina pada Februari 2022 juga mendapatkan dukungan balasan dari Junta Militer Myanmar yang menggambarkan tindakan Rusia sebagai “tindakan yang tepat” dan upaya tersebut dianggap sebagai “upaya Rusia untuk memperkuat kedaulatan nasionalnya” dan mewajarkan hal tersebut karena Myanmar beranggapan bahwa Rusia merupakan “negara kuat yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan untuk perdamaian dunia” (VOA, 2022).

Kebijakan Rusia untuk beralih ke timur yang memunculkan kedekatan dengan negara negara di kawasan Asia-Pasifik, terutama dengan Myanmar yang menunjukkan ketergantungannya terhadap Rusia untuk memenuhi pasokan persenjataan dan bahan bakar dalam upaya meredam pemberontak sipil yang membutuhkan pendanaan dan persenjataan dari Rusia, menunjukkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara membuat peneliti memilih untuk meneliti lebih dalam mengenai hubungan bilateral antara Rusia dan Myanmar di tengah konflik dan sanksi yang diberikan dengan membahas fenomena tersebut dengan judul Pengaruh Kebijakan ‘*Russia’s Pivot to the East*’ terhadap Hubungan Bilateral Rusia-Myanmar tahun 2021-2023.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, berdasarkan yang didefinisikan oleh John W Creswell yaitu suatu pendekatan penelitian untuk membangun pernyataan- pernyataan yang berisikan pengetahuan berdasarkan pada perspektif yang sifatnya konstruktif, yaitu perspektif yang bersumber pada pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah yang bertujuan untuk

membangun suatu teori maupun pola pengetahuan tertentu (Creswell, 2017). Metode penelitian kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data yang menggambarkan (deskriptif) dan menafsirkan suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata tertulis yang berbasis pada dokumen-dokumen maupun lisan dari orang lain yang bersumber dari wawancara mengenai suatu fenomena yang diamati (Creswell, 2017). Dalam penelitian ini peristiwa yang diamati yaitu mengenai bagaimana kebijakan *Russia Pivot to the East* berdampak hubungan bilateral antara Rusia dan Myanmar tahun 2021-2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai “Kebijakan ‘*Russia’s Pivot to the East*’ terhadap Hubungan Bilateral Rusia-Myanmar 2021- 2023” menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sektor-sektor yang terdampak dari hubungan bilateral yang terjalin antara Rusia dan Myanmar pada tahun 2021-2023 yaitu sektor *soft power*, kredibilitas politik dan keuntungan demokratis. Tujuan utama dari penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian mengenai kebijakan *Russia Pivot to the East* mempengaruhi hubungan bilateral antara Rusia dan Myanmar tahun 2021- 2023 adalah untuk memahami fenomena hubungan bilateral yang terjalin antara Rusia dan Myanmar tahun 2021-2023 di sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan gambaran mengenai fenomena yang dikaji menjadi variabel-variabel yang saling terkait satu sama lain agar diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti untuk kemudian dapat dihasilkan sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hubungan bilateral antara Rusia dan Myanmar semakin menguat sejak pengakuan Rusia atas pemerintahan Junta Militer Myanmar yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021. Pengakuan ini mendapatkan dukungan balasan dari Myanmar yang menganggap bahwa invasi Rusia ke Krimea pada 24 Februari 2022 sebagai upaya dalam mengkonsolidasikan kedaulatan Rusia sekaligus menunjukkan kekuatan Rusia kepada dunia (*Myanmar's Military Council Supports Russia's Invasion of Ukraine*, 2022). Hubungan bilateral yang terjalin antara Rusia dan Myanmar menghasilkan interdependensi kompleks bagi kedua negara, mengacu dari teori yang dikemukakan Robert Keohane dan Joseph Nye dalam "*Power and Interdependence*". Interdependensi dalam politik internasional mengacu pada situasi efek timbal balik antar negara atau antar aktor di negara yang berbeda. Interdependensi kompleks menekankan pada hubungan timbal balik yang kompleks antar aktor transnasional yang saling bergantung terhadap tindakan satu sama lain dan berupaya untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain (Keohane & Nye, 1977).

Interdependensi kompleks antara Rusia dan Myanmar yang terjalin seiring menguatnya hubungan bilateral kedua negara memberikan dampak sebagai berikut.

Dampak Kebijakan *Russia's Pivot To The East* Terhadap Hubungan Bilateral Rusia-Myanmar Tahun 2021-2023

1) Sumber Daya *Soft Power* Negara Besar

Soft Power didefinisikan oleh Joseph Nye sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu keinginan yang berasal dari hasil kebijakan melalui daya tarik dan persuasi, bukan dengan kekerasan dan paksaan (Nye, 2004). Suatu negara bisa

mendapatkan hasil yang diinginkannya melalui *soft power* karena negara lain memiliki ketertarikan terhadap nilai-nilai yang dimiliki negara tersebut, sehingga meniru dan meneladani negara tersebut karena menginginkan kemakmuran dan keterbukaan negara tersebut. Singkatnya, *soft power* merupakan kemampuan untuk membentuk preferensi negara lain yang berkiblat pada negara tersebut (Nye, 1990).

Rusia memiliki pemahaman tersendiri mengenai konsep *soft power*. Berbeda dengan Joseph Nye yang melihat *soft power* sebagai daya tarik yang dimiliki oleh suatu negara berdasarkan pada budaya, nilai-nilai politik serta kebijakan luar negeri suatu negara, Rusia memandang *soft power* sebagai instrumen non-militer yang bertujuan untuk memanipulasi dan melemahkan lawan yang menjadikan *soft power* sebagai pelengkap dari kekuatan militer Rusia. Hal ini berdasarkan definisi Vladimir Putin dalam artikel "*Russia in a Changing World*" yang dirilis tahun 2012. Ia mendefinisikan *soft power* sebagai "sebuah alat dan metode yang kompleks untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tanpa menggunakan senjata, tetapi menggunakan alat informasi serta bentuk-bentuk intervensi lainnya" (Putin, 2012)

Kebijakan yang diambil Putin dalam membangun konsep *soft power* ala Rusia diantaranya adalah membuat badan khusus bernama *Rosstrudnichestvo* (*Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation*/Badan Federal untuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang Tinggal di Luar Negeri dan Kerjasama Kemanusiaan Internasional). *Rosstrudnichestvo* pada awalnya dibentuk untuk mempromosikan budaya dan bahasa Rusia di negara-negara pecahan Uni Soviet, namun saat ini cakupannya meluas hampir

ke seluruh dunia, termasuk dengan Myanmar yang terjalin sejak tahun 2014(Orysia Lutsevych, 2016).

Rossotrudnichestvo secara resmi diberi peran utama dalam mengembangkan *soft power* Rusia melalui diplomasi publiknya, yaitu penguatan pengenalan bahasa dan beasiswa ke negara tersebut. Badan negara ini bertindak sebagai payung organisasi yang mengoperasikan enam puluh Pusat Sains dan Kebudayaan Rusia yang tersebar hampir di seluruh dunia. Myanmar menjadi salah satu negara yang mendapatkan tawaran bantuan di sektor pendidikan oleh Rusia.

Pada tanggal 23-24 November 2022, Menteri Kerjasama Internasional U Ko Ko Hlaing, Menteri Luar Negeri U Wunna Maung Lwin dan Menteri Pendidikan Junta Myanmar, Dr. Nyunt Pe mengunjungi Rusia dalam pembahasan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Myanmar di universitas- universitas Rusia. Selain pemberian beasiswa bagi mahasiswa, Rusia juga memberikan beasiswa kepada dosen Myanmar untuk meningkatkan kualitas akademi di Naypyitaw serta melakukan pertukaran guru bahasa Burma dan Rusia yang direncanakan untuk dilaksanakan pada 2023(The Irrawaddy, 2022). Sejak tahun 2000, Rusia telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 7.000 perwira militer Myanmar untuk meraih gelar master dan doktor di Rusia, dan saat ini tengah memperluas kerjasama di bidang pendidikan di luar pelatihan terhadap perwira militernya.

Dalam pidatonya di *Eastern Ecomic Forum* (Forum Ekonomi Timur), September 2023, Menteri Pariwisata Myanmar, Thet Thet Khine mengumumkan program “*Welcome, Russians!*” yang bertujuan untuk menarik wisatawan Rusia untuk melancong ke Myanmar. Untuk mendukung program tersebut,*Myanmar Airways*

International meresmikan penerbangan langsung dari Novosibirsk ke Yangon dengan persinggahan di Mandalay. Khine menegaskan bahwa dengan adanya penerbangan langsung, akan meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi wisatawan yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata kedua negara(Iuliia Tore, 2023).

Selain dibukanya kembali penerbangan langsung dari Rusia ke Myanmar setelah 30 tahun, pemerintah Myanmar dan Pemerintah Rusia juga berencana untuk menandatangani perjanjian mengenai bebas visa di tahun 2024 mendatang. Penyederhanaan aturan visa merupakan penunjang dalam upaya meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan Rusia ke Myanmar(Forumvostok, 2024).

Tidak hanya melalui bahasa dan kebudayaan, Rusia juga menggunakan peran *soft power* sebagai pembentuk dan penguatan opini masyarakat dengan menekankan pada penyebaran informasi dari Rusia ke seluruh dunia untuk menyajikan variasi opini dimasyarakat (Alfarauqi, 2018). Dalam upaya mengontrol pemberitaan mengenai Rusia-Myanmar, media internasional Rusia, “*Sputnik News Media*” yang dijuluki sebagai “*Firehouse of Propaganda*” (selang pemadam kebakaran propaganda), menandatangani perjanjian kerjasama dalam penyebaran konten dengan saluran media Junta Militer Myanmar, “*Global New Light of Myanmar*”(The Irrawaddy, 2023)

Sumber daya *soft power* negara besar dapat dipahami sebagai kemampuan negara untuk mengolah sumber daya yang dimiliki meliputi budaya, nilai-nilai yang dianut oleh negara serta kebijakan luar negerinya sebagai daya tarik untuk memberikan citra agar terlihat menarik bagi masyarakat di luar negaranya. Daya tarik inilah yang berguna bagi negara untuk menciptakan

“tekanan” kepada negara lain yang menjadi sasaran dari *soft power* agar melakukan kebijakan sesuai dengan keinginan negara yang melakukan *soft power*. Dalam konteks pembahasan ini, Rusia sebagai subjek pelaku *soft power* menjadikan Myanmar sebagai objek *soft power*, dimana Rusia melalui diplomasi publiknya melalui budaya, bahasa, pariwisata dan arus informasi “menekan” Myanmar untuk membuat kebijakan untuk menerima *soft power* dari Rusia. Terbukti dengan dibukanya pusat pelatihan bahasa Rusia, dibuatnya kebijakan “*Welcome, Russian!*” serta kerjasama media massa Rusia-Myanmar yang menjadikan Myanmar sebagai salah satu sasaran propaganda *soft power* Russia.

2) **Kredibilitas Politik**

Kredibilitas mengacu pada persepsi atau penilaian terhadap kepercayaan suatu aktor ke aktor lain, baik aktor negara maupun non negara

melalui upaya satu pihak untuk mempengaruhi persepsi pihak lainnya (McCroskey & Young, 1981). Membangun kredibilitas artinya mengembangkan reputasi suatu negara. Semakin besar kredibilitas suatu negara, maka akan semakin besar juga kepercayaan negara lain yang membuat mereka sukarela untuk bekerjasama dan mengikuti kemauan negara tersebut (Nye, 2004).

Kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar berujung pada pengangkatan pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing yang menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara (*State Administration Council*) sekaligus Perdana Menteri dari pemerintahan darurat sementara Myanmar. Aksi ini menimbulkan kecaman internasional serta menjatuhkan sanksi kepada para pimpinan SAC. Penolakan Min Aung Hlaing terhadap *Five Points Consensus ASEAN* membuat Myanmar tidak diundang

dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut(Eka Yudha Saputra, 2021). Min Aung Hlaing juga tidak diundang dalam *Belt Road Initiative (BRI) Summit* di Beijing pada Oktober 2023,meskipun proyek BRI telah membiayai sejumlah proyek besar di Myanmar. Kredibilitas politik Myanmar yang merosot membuat kepercayaan negara-negara terhadap Myanmar menurun.(The Irrawaddy, 2023)

Rusia melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mendekati Myanmar melalui dukungannya terhadap pemerintahan Junta Militer Myanmar dan menunjukkan kredibilitasnya sebagai mitra yang baik bagi Myanmar.Dukungan nyata Moscow diawali pada Maret 2021, ketika Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin menghadiri Hari Angkatan Bersenjata Myanmar di Naypyidaw. Fomin menyebut Myanmar sebagai 'sekutu andal dan mitra strategis Rusia di Asia Tenggara' dan menekankan bahwa Moskow akan terus berupaya untuk meningkatkan hubungan diantara kedua negara(Uliana Pavlova, 2021). Rusia menjadi salah satu negara yang mengakui pemerintahan Junta Militer Myanmar. Bersama dengan Tiongkok, Rusia menyatakan *abstain* untuk mencegah dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan Myanmar(M.Lederer, 2022). Perwakilan delegasi Rusia di PBB menyatakan bahwa konflik Myanmar tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional. Adanya peralihan kekuasaan merupakan bentuk demokratis di Myanmar dan merupakan masalah internal negaranya, sehingga adanya campur tangan PBB dan sanksi Barat hanya akan memperkeruh keadaan di Myanmar(UN, 2022).

Untuk membalas dukungan Rusia terhadap pemerintahan Junta di forum PBB, dukungan balasan diberikan atas invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, di mana Myanmar

menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mendukung invasi tersebut. Myanmar menyebut bahwa tindakan Rusia sebagai unjuk kekuatannya di mata dunia (VOA Burmese Service, 2022). Dalam pertemuannya dengan Vladimir Putin dalam Forum Ekonomi Timur, Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan “*leader of the world*” yang menciptakan stabilitas politik internasional. Hlaing berterima kasih kepada Putin atas jasanya yang menyelamatkan Myanmar dari masa-masa sulit ditengah isolasi dan sanksi Barat dan menyebut Rusia sebagai “*Myanmar’s forever friend*” (TASS, 2022).

Rusia juga menjadi pemasok utama senjata ke Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021 yang berujung sanksi Barat untuk mengembargo penjualan senjata ke Myanmar. Sejak kudeta politik yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, PBB mencatat transaksi pembelian senjata yang dilakukan oleh Myanmar mencapai \$ 1 Milyar, termasuk didalamnya merupakan pembelian senjata dari Rusia sebanyak \$406 juta yang dengan Rosoboronexport sebagai pemasok terbesar terhadap penjualan senjata ke Myanmar dengan transaksi mencapai lebih dari \$277 juta yang digunakan secara langsung maupun pembelian bahan mentah untuk mendukung produksi senjata dalam negeri maupun peralatan manufaktur militer Myanmar (Rights, 2023).

Selain bantuan alutsita dan persenjataan militer untuk bertahan ditengah embargo senjata oleh Barat, Rusia juga memberi Myanmar bantuan untuk bertahan di tengah isolasi diplomatiknya. Berdasarkan data WHO tahun 2021, cakupan vaksinasi *Covid-19* di Myanmar menjadi salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (UNICEF Myanmar, 2021). Rusia memberikan bantuan vaksin *Covid-19* sebagai dukungan terhadap Myanmar untuk

meningkatkan persebaran vaksinasi Covid-19 ditengah isolasi internasional. Sebanyak lebih dari 400.000 dosis vaksin *Sputnik Light* didonasikan Rusia ke Myanmar melalui Kementerian Kesehatan sebagai dukungan dalam melawan pandemi Covid-19(Agency, 2022)

Hubungan Myanmar yang memburuk dengan negara-negara ASEAN setelah tidak tercapainya *Five Points Consensus*, membuat Myanmar bermanuver ke forum-forum multilateral dimana Rusia berperan sebagai “kunci”. Myanmar diundang untuk menghadiri *Eastern Economic Forum* (EEF) pertama kalinya setelah kudeta pada 2-4 September 2021 di Vladivostok, Rusia. Myanmar berharap forum ini mejadi peluang untuk mempererat kerjasama ekonomi dengan Rusia(Mizzima, 2021). Kehadiran Myanmar dalam Forum Ekonomi Timur telah menjadi agenda tahunan, bahkan kehadiran Myanmar sudah direncanakan untuk menghadiri EEF ke-9 pada 3-6 September 2024 untuk menandatangani kebijakan bebas visa dengan Rusia(Roscongress, 2024).

Hubungan Myanmar yang memburuk dengan negara-negara ASEAN setelah tidak tercapainya *Five Points Consensus*, membuat Myanmar bermanuver ke forum-forum multilateral dimana Rusia berperan sebagai “kunci”. Myanmar diundang untuk menghadiri *Eastern Economic Forum* (EEF) pertama kalinya setelah kudeta pada 2-4 September 2021 di Vladivostok, Rusia. Myanmar berharap forum ini mejadi peluang untuk mempererat kerjasama ekonomi dengan Rusia(Mizzima, 2021). Kehadiran Myanmar dalam Forum Ekonomi Timur telah menjadi agenda tahunan, bahkan kehadiran Myanmar sudah direncanakan untuk menghadiri EEF ke-9 pada 3-6 September 2024 untuk menandatangani kebijakan bebas visa dengan Rusia (Roscongress, 2024).

3) Keuntungan Demokratis

Rusia dan Myanmar bekerjasama dalam pelaksanaan pemilu di masing- masing negara. Pada Mei 2023, Myanmar dan Rusia menandatangani MoU mengenai kerjasama pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. Wakil ketua pemilihan umum Rusia, Kara-Ool bertemu dengan kepala Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk oleh Junta Militer Muanmar, U Thei Soe terkait penandatanganan nota kesepahaman antara badan pemilu Rusia dan Myanmar yang membahas mengenai pertukaran informasi seputar pelaksanaan pemilihan umum(The Irrawaddy, 2023).

Kerjasama ini selain memperkuat hubungan dengan Rusia juga memberi kesempatan bagi Myanmar untuk memberikan pendidikan mengenai pemilihan umum melalui Konferensi Ilmiah dan Politik Internasional yang memberikan pemahaman baru mengenai sistem penyelenggaraan pemilu, metode manajemen pemilu, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemilu di Rusia serta bertukar pengalaman antar pemantau pemilu internasional. Studi banding ini berlangsung pada 12 hingga 20 Maret 2024, bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu Rusia 2024 dengan Vladimir Putin sebagai pemenangnya. Hasil ini menjadikan Putin sebagai Presiden Rusia hingga tahun 2030 mendatang(Agency, 2024). Kemenangan Putin menjadi acuan Junta Myanmar untuk memenangkan pemilu yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang(The Business Standard, 2023).

Junta militer Myanmar beberapa kali menyinggung soal perencanaan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2023. Namun pada bulan Februari, Min Aung Hlaing sebagai pemimpin tertinggi Myanmar darurat memerintahkan perpanjangan status

darurat negara dan menunda pemilu hingga tahun 2025. Penundaan pemilu berarti perpanjangan waktu bagi junta militer Myanmar untuk mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah yang mereka kuasai sekaligus perpanjangan waktu bagi junta Myanmar untuk mempersiapkan strategi kemenangan agar tetap bisa memegang kekuasaan tertinggi di Myanmar. Mengingat junta militer Myanmar hanya memiliki kendali yang kuat sebanyak 17% sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk memenangkan pemilu (Joshua Kurlantzick, 2023). Salah satu persiapan pemilu yang dilakukan oleh Junta Myanmar adalah amandemen UU pemilu baru yang lebih ketat terhadap partisipasi partai politik. Undang-undang pemilu hasil amandemen yang menggantikan UU tahun 2010 melarang partai politik dan kandidat yang dianggap memiliki hubungan dengan individu maupun organisasi yang dianggap melanggar hukum. Partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu juga harus memiliki setidaknya 100.000 anggota dalam waktu tiga bulan sejak mendaftarkan diri, paling lambat dua bulan sejak undang-undang tersebut diumumkan dan menyetorkan dana sebesar 100 juta kyat ke bank ekonomi Myanmar milik negara. Jumlah ini 100 kali lebih banyak dari aturan sebelumnya. (Al Jazeera, 2023)

Pada implementasinya keuntungan demokrasi yang didapatkan dari kedekatan Myanmar dengan Rusia adalah terjalinnya kerjasama dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun dalam pelaksanaannya mencerminkan demokrasi secara ideal. Myanmar melihat Rusia sebagai negara yang “demokratis” karena secara konsisten melaksanakan pemilihan umum secara terbuka dan menghasilkan kemenangan secara konsisten pula yaitu terpilihnya kembali Vladimir Putin untuk ke lima kalinya. Myanmar ingin meniru keberhasilan pemilu Rusia dan Rusia

dengan senang hati membantu Junta Militer Myanmar untuk memenangkan pemilu agar hubungan bilateral kedua negara bisa terus terjalin.

Meskipun beresiko, Junta Myanmar menganggap bahwa pelaksanaan pemilu merupakan langkah awal untuk memperbaiki legitimasi kepemimpinan Junta Myanmar di kancah internasional. Kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pimpinan tertinggi Myanmar sekaligus Perdana Menteri Myanmar berdasarkan penunjukan pribadi dengan alasan Myanmar sedang berada dalam keadaan darurat setelah kudeta politik yang dilakukan Junta Militer 2021 silam. Jika Junta Militer Myanmar berhasil memenangkan pemilu, maka legitimasi kepemimpinan Junta akan lebih sah dan divalidasi, meskipun pada pelaksanaannya diatur undang-undang sedemikian rupa untuk memperbesar peluang Junta Militer untuk kembali berkuasa, termasuk pengecualian partai sipil yang terafiliasi dengan Aung San Suu Kyi yang menjadi tahanan politik oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar. Langkah ini diharapkan memperbesar peluang Junta Militer Myanmar untuk memenangkan pemilu dan dianggap sebagai pemimpin Myanmar yang sah berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis.

KESIMPULAN

Kebijakan *Russia's pivot to the east* yang mendasari Rusia untuk melakukan ekspansi kerjasama terutama di bidang ekonomi ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang dianggap memiliki perkembangan yang pesat dalam sektor ekonomi. Peristiwa kudeta politik yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada tahun 2021 memberikan peluang bagi Rusia untuk menggaet Myanmar

sebagai mitra ekonomi di kawasan Asia Tenggara, ditengah krisis kepercayaan terhadap Rusia akibat sanksi Barat yang berpengaruh pada penurunan kepercayaan negara-negara terhadap Rusia, termasuk Vietnam yang selama ini mejadi mitra utama Rusia.

Hubungan bilateral Rusia dan Myanmar yang semakin erat yang menciptakan interdependensi diantara kedua negara, yang berdampak kepada tiga aspek yang berdasarkan pada teori interdependensi kompleks yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye, yaitu sumber daya *soft power* negara besar, kredibilitas politik serta keuntungan demokratis yang secara timbal balik berdampak bagi kedua negara. Rusia yang memiliki sumber daya *soft power* yaitu bahasa dan budaya Rusia menjadikan Myanmar sebagai “lahan” untuk mengembangkan *soft power* tersebut melalui dibukanya beasiswa bagi mahasiswa Myanmar untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas di Rusia. Sebagai timbal balik, Myanmar membuka pusat pelatihan studi bahasa Rusia serta kebijakan “*Welcome, Russian!*” untuk meningkatkan kunjungan turis Rusia menikmati pariwisata Myanmar.

Kerjasama antara Rusia dan Myanmar juga meningkatkan kredibilitas politik kedua negara. Rusia membantu pemerintahan Junta Myanmar yang berada dalam sanksi embargo senjata dan isolasi politik untuk mendapatkan pasokan senjata sekaligus membuka peluang investasi perusahaan swasta Rusia, dan Myanmar sebagai konsumen utama persenjataan Rusia saat ini meningkatkan kredibilitas Rusia sebagai pemasok senjata terpercaya dibandingkan negara lainnya.

Terakhir, keuntungan demokratis yang didapatkan kedua negara melalui kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan pemilu memungkinkan junta untuk memenangkan pemilu di Myanmar

dan menjadi pemimpin yang terlegitimasi di kancah internasional. Kemenangan Junta Myanmar akan menguntungkan Rusia sebagai mitra dalam menjalin kerjasama-kerjasama di masa pemerintahan mendatang. Meskipun jika dilihat dari prosedur pelaksanaannya, Rusia hanya membantu Myanmar untuk melaksanakan pemilihan umum untuk kembali memenangkan Junta Myanmar tetapi tidak membantu Myanmar dalam melaksanakan pemilu secara demokratis mengingat tujuan utama Rusia adalah untuk mempertahankan kerjasama dengan Junta Militer Myanmar untuk mengamankan posisi geopolitik Rusia di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, M. N. (2022). *MoH receives 400,000 doses of Sputnik Light COVID-19 vaccines from Russia*. Global New Light of Myanmar. <https://www.gnlm.com.mm/moh-receives-400000-doses-of-sputnik-light-covid-19-vaccines-from-russia/>
- Agency, M. N. (2024). *Myanmar delegation meets Russian Central Election Commission Chairman in Moscow*. Global New Light of Myanmar. <https://www.gnlm.com.mm/myanmar-delegation-meets-russian-central-election-commission-chairman-in-moscow/>
- Al Jazeera. (2023). *Myanmar military announces strict new election law ahead of polls*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/27/myanmar-military-unveils-strict-new-election-law-ahead-of-polls>
- Alfarauqi, M. D. A. (2018). Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 170–179.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Eka Yudha Saputra. (2021). *ASEAN Tolak Min Aung Hlaing Wakili Myanmar pada KTT Regional dengan Cina*. Tempo.Co.

- <https://dunia.tempo.co/read/1530337/asean-tolak-min-aung-hlaing-wakili-myanmar-pada-ktt-regional-dengan-cina>
- Fortescue, S. (2015). *Post-Soviet Affairs Russia 's " turn to the east ": a study in policy making*. July, 423–454.
<https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1051750>
- Forumvostok. (2024). *Visa Waiver Proposition Between Russia and Myanmar To Be Signed At EEF 2024*. Eastern Economic Forum News. <https://forumvostok.ru/en/news/visa-waiver-proposition-between-russia-and-myanmar-to-be-signed-at-eef-2024-/>
- Gorbachev, M. (1986). *Excerpts From Gorbachev's Speech*. The New York Times.
<https://www.nytimes.com/1986/07/29/world/excerpts-from-gorbachev-s-speech.html>
- Hunt, L. (2021). *Russia Seeks to Strengthen Old Ties with Myanmar Junta*. VOA. https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_russia-seeks-strengthen-old-ties-myanmar-junta/6202663.html
- Iuliia Tore. (2023). *Myanmar Welcomes Russian Tourists with New Program*. RusTourismNews.
<https://www.rustourismnews.com/myanmar-welcomes-russian-tourists-with-new-program/>
- Joshua Kurlantzick. (2023). *War-Torn Myanmar Plans to Hold Elections. Will They Matter?* Council on Foreign Relations.
<https://www.cfr.org/in-brief/war-torn-myanmar-plans-hold-elections-will-they-matter>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Longman (Ed.); 4th ed.). Little Brown and Company.
- Lukin, A. (2016). Russia's pivot to Asia: Myth or reality? *Strategic Analysis*, 40(6), 573–589.
- Lukin, A. (2018). Introduction □ : Russia in the Asia-Pacific. *Asian Politics and Policy*, 10(4), 576–583.
<https://doi.org/10.1111/aspp.12421>
- M.Lederer, E. (2022). *Russia and China block UN statement on Myanmar crisis*.
 AP News. <https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-asia-china>

- McCroskey, J. C., & Young, T. J. (1981). Ethos and credibility: The construct and its measurement after three decades. *Communication Studies*, 32(1), 24–34.
- Mizzima. (2021). *Myanmar to attend Eastern Economic Forum*. Mizzima News. <https://mizzima.com/article/myanmar-attend-eastern-economic-forum>
- Myanmar's Military Council Supports Russia's Invasion of Ukraine*. (2022). VOA Burmese Service. <https://www.voanews.com/a/myanmar-s-military-council-supports-russia-s-invasion-of-ukraine/6458527.html>
- Nye, J. S. (1990). *Bound to lead: the changing nature of American power*. Basic books.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public affairs.
- Orysia Lutsevych. (2016). *The Long Arm of Russian "Soft" Power*. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-long-arm-of-russian-soft-power/>
- Putin, V. (2012a). *News conference following APEC Leaders' Week*. Kremlin Russia. <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/16432>
- Putin, V. (2012b). *Russia and the Changing World (Россия и меняющийся мир)*. Moskovskiye Novosti. <https://www.mn.ru/politics/78738>
- Putin, V. (2013). *The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation*. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official%0A_documents
- Rights, U. H. (2023). *UN expert exposes \$1 billion "death trade" to Myanmar military*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/un-expert-exposes-1-billion-death-trade-myanmar-military>
- Roscongress. (2024). *Visa Waiver Proposition Between Russia and Myanmar to be Signed at EEF 2024*. Eastern Economic Forum News. <https://forumvostok.ru/en/news/visa-waiver-proposition-between-russia-and-myanmar-to-be-signed-at-eeef-2024-/>
- Storey, I. (2021). The Russia-China Strategic Partnership and Southeast Asia : Alignments and Divergences. *ISEAS Perspective*, 117, 1–12.
- TASS. (2022). *Myanmar premier says he considers Putin 'leader of*

the world.'

Russian News Agency. <https://tass.com/world/1503803>

The Business Standard. (2023). *Myanmar junta "likely" to hold polls in 2025: Party officials.* The Business Standard. <https://www.tbsnews.net/world/myanmar-junta-likely-hold-polls-2025-party-officials-695302>

The Irrawaddy. (2022). *Junta Watch: Pro-Regime Media Spin Biden Comment; State and Regional Govts Warned; and More.* The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/factiva/junta-watch-pro-regime-media-spin-biden-comment-state-and-regional-govts-warned-and-more.html>

The Irrawaddy. (2023a). *Myanmar Junta Adds Russia's 'Firehose of Propaganda' to its Arsenal.* The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/news/myanmars-crisis-the-world/myanmar-junta-adds-russias-firehose-of-propaganda-to-its-arsenal.html>

The Irrawaddy. (2023b). *Russian Lower House Official Pledges Support for Myanmar Regime's Planned Poll.* The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/russian-lower-house-official-pledges-support-for-myanmar-regimes-planned-poll.html>

The Irrawaddy. (2023c). *Snubbed Myanmar Junta Leader Must Watch China's BRI Summit From Home.* The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/news/myanmar-china-watch/snubbed-myanmar-junta-leader-must-watch-chinas-bri-summit-from-home.html>

Uliana Pavlova. (2021). *Russia to Deepen Ties With Myanmar Military Junta, Top Defense Official Says in First Visit After Coup.* The Moscow Times. <https://www.themoscowtimes.com/2021/03/26/russia-to-deepen-ties-with-myanmar-military-junta-top-defense-official-says-in-first-visit-after-coup-a73387>

UN, P. (2022). *As Crisis in Myanmar Worsens, Security Council Must Take Resolute Action to End Violence by Country's Military, Address Humanitarian Situation, Speakers Urge.*

<https://press.un.org/en/2022/sc15652.doc.htm>

UNICEF Myanmar. (2021). *Joint statement by GAVI, UNICEF and WHO on efforts to accelerate COVID vaccine availability in Myanmar*. UNICEF.

<https://www.unicef.org/myanmar/press-releases/joint-statement-gavi-unicef-and-who-efforts-accelerate-covid-vaccine-availability>

VOA. (2022). *Myanmar's Military Council Supports Russia's Invasion of Ukraine*. <https://www.voanews.com/a/myanmar-s-military-council-supports-russia-s-invasion-of-ukraine/6458527.html>

VOA Burmese Service. (2022). *Myanmar's Military Council Supports Russia's Invasion of Ukraine*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/myanmar-s-military-council-supports-russia-s-invasion-of-ukraine/6458527.html>